

## HUBUNGAN SIPIL DAN MILITER MELALUI DINAMIKA KUDETA MILITER DI THAILAND

Yusa Djuyandi<sup>1</sup>, Tiarma Delsita<sup>2</sup>, Gina Fahira<sup>3</sup>, Diajeng Askhia<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Program Studi Ilmu Politik, Universitas Padjajaran, Indonesia  
 Email : yusa.djuyandi@unpad.ac.id

*Submitted: 02-12-2023; Accepted: 16-12-2023; Published : 19-12-2023*

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkajifenomena-fenomena krisis konflik di Thailand, terutama dalam aspek perubahan pemerintahan Thailand melalui aksi kudeta. Kudeta (Bahasa Perancis: *Coup d'etat*) merupakan pukulan terhadap negara, atau dapat diartikan pula sebagai bentuk perebutan kekuasaan secara paksa. Aksi kudeta ini dilakukan oleh komponen militer yang berusaha merebut kekuasaan pemerintahan sipil. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, data diperoleh dari sumber sekunder yang berasal dari jurnal maupun sumber pemberitaan yang kemudian divalidasi dengan teknik triangulasi. Thailand sebagai sebuah negara dunia ketiga yang berada di kawasan Asia Tenggara, pada awalnya memiliki sistem pemerintahan monarki yang seiring dengan pergantian periode pemerintahan, pada pemberontakan kudeta perdana pada tahun 1932 berhasil menggulingkan kekuasaan monarki absolut dan menggantikannya menjadi monarki konstitusional. Mengikuti pemberontakan tersebut adalah sepuluh pemberontakan lainnyadengan 30 kali masa percobaan, di antara lain adalah Kudeta Thailand 1991, Kudeta Thailand2006, dan Kudeta Thailand 2014 yang secara lebih rinci akan menjadi fokus utama pengkajiandalam penelitian ini.

**Kata Kunci:** Hubungan Sipil dan Militer, Kudeta Militer, Thailand, dan Sistem Pemerintah

### ABSTRACT

*This research aims to examine the phenomena of the conflict crisis in Thailand, especially in the aspect of change in the Thai government through a coup. A coup (French: Coup d'etat) is a blow to the state, or can also be interpreted as a form of forced seizure of power. This coup was carried out by the military component trying to seize power from the civilian government. This research uses qualitative methods, data is obtained from secondary sources originating from journals and news sources which are then validated using triangulation techniques. Thailand, as a third world country in the Southeast Asia region, initially had a monarchical system of government which, along with changes in government periods, in the first coup rebellion in 1932 succeeded in overthrowing the power of an absolute monarchy and replacing it with a constitutional monarchy. Following this rebellion were ten other rebellions with 30 trial periods, including the 1991 Thai Coup, 2006 Thai Coup, and 2014 Thai Coup, which in more detail will be the main focus of study in this research.*

**Keywords:** Civil and Military Relations, Military Coup, Thailand, and the Government System

### PENDAHULUAN

Hubungan anatomi antara sipil dan militer, dapat diartikan sebagai bentuk hubungan interaksi yang bersifat saling timbal balik. Menurut Cohen (1997), terdapat tiga tingkatan hubungan sipil- militer, yaitu: (1) Hubungan militer denganseluruh masyarakat di suatu negara; (2) Hubungan militer dengan

lembaga pemerintahan maupun swasta, dan; (3) Hubungan antara perwira militer senior dengan politisi dan negarawan. Selain itu, dapat dikatakan pula bahwa keberadaan militer selain sebagaialat pertahanan negara, juga berfungsi untuk membantu keberadaan pemerintahan sipil. Dengan catatan, militer tidak boleh mencampuri urusan ~~IPOLEKSOSBUD~~ (ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya). Namun, dalam

perkembangannya di beberapa negara, militer seringkali melakukan campur tangan pada IPOLEKSOSBUD tersebut. Tak hanya itu, dikotomi dan dominasi oleh salah satu komponen juga dapat menyebabkan munculnya rasa saling curiga yang mengarah pada ketidakharmonisan dan perpecahan antara dua komponen tersebut.

Menurut Huntington (1959) bahwa supremasi sipil berarti meminimalisir intervensi militer dalam kegiatan politik. Hal ini mengartikan bahwa otoritas sipil sudah diakui dalam merumuskan dan mengawasi implementasi kebijakan yang diberlakukan pada bidang militer atau pertahanan. Secara tidak langsung pula, hal ini menandakan bahwa militer tengah diarahkan menuju profesionalisme militer. Terdapat tiga faktor untuk mewujudkan profesionalisme militer, yaitu: (1) *Expertise* atau keahlian yang menandakan bahwa seseorang harus mempunyai pengetahuan dan keterampilan di bidang tertentu; (2) *Social responsibility* atau tanggung jawab sosial yang mengartikan bahwa profesional militer ini harus bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melindungi negara dan masyarakatnya, dan; (3) *Corporateness* atau lembaga yang didasarkan pada kesadaran dan loyalitas anggota.

Pada bahasan kali ini, peneliti akan berfokus pada hubungan sipil-militer di negara Thailand. Thailand merupakan negara dengan sistem pemerintahan monarki konstitusional yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Sistem pemerintahan tersebut menunjukkan bahwa kepala negara dipimpin oleh seorang raja dan kepala pemerintahan oleh seorang perdana menteri. Negara yang kerap disebut sebagai negara gajah putih tersebut merupakan salah satu bagian dari negara dunia ketiga yang masih berkembang.

Sejak diberlakukannya sistem konstitusi monarki pada tahun 1932, Thailand harus dihadapkan pada berbagai permasalahan terkait perebutan kekuasaan antara konstitusionalisme dan militer. Hampir semua Perdana Menteri Thailand pun dilatarbelakangi oleh orang dari militer. Militer seringkali melakukan usaha untuk

mengambil kekuasaan pemerintah sipil melalui cara-cara kekerasan. Berdasarkan *Washington Post* (diambil dari Detik News, 2014), perebutan kekuasaan atau kudeta di Thailand terjadi sebanyak 11 kali pada tahun 1932, 1933, 1947, 1951, 1957, 1958, 1971, 1976, 1977, 1991, 2006, dan 2014 dengan kurang lebih 30 kali percobaan.

Kudeta yang dilakukan pada tahun 1932 dan 1933 dikenal sebagai momen Kudeta Berdarah dan Revolusi Siam. Kudeta tersebut berhasil menggulingkan kekuasaan monarki absolut Raja Prajadhipok dan Perdana Menteri pertamanya yaitu Phraya Manopakorn Nititada yang dilakukan oleh kelompok militer dan sipil yang dipimpin oleh Phibunsongkram dan Pridi Phanomyong. Kemudian pada 1947, militer Thailand menggulingkan pemerintahan dari laksamana muda Thawal Thamrong Nawasawat yang banyak tersangkut skandal dan korupsi. Pada 1951, militer Thailand melakukan kudeta dengan menunjuk panglima tertinggi Phibunsongkram sebagai perdana menteri.

Pada 1957, adanya kudeta oleh panglima Sarit Thanarat. Pada 1958, adanya kudeta yang disebut sebagai Era Baru Otoriter. Pada 1971, Panglima tertinggi militer, Thanom Kittikachorn, melakukan kudeta atas pemerintahannya sendiri dan membubarkan parlemen sebagai usaha untuk menghilangkan ideologi komunis yang berkembang saat itu. Pada 1977, kudeta oleh laksamana Sangad Chalory. Pada 1991, penangkapan perdana menteri Chatichai Choonhavan sebagai upayamenyaingi elite militer. Pada 2006, militer membubarkan pemerintahan dan konstitusi yang terbentuk tahun 1997. Serta yang terakhir pada 2014 dimana momen ketidakharmonisan antara dua kubu politik dimanfaatkan oleh militernya sebagai usaha melakukan kudeta. Secara lebih lanjut, pembahasan ini akan berfokus pada tiga peristiwa terakhir pada kudeta yang dilakukan oleh militer di Thailand, yaitu pada tahun 1991, 2006, dan 2014.

## METODE

Artikel ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif sebagai metode utama penelitian. Dikutip dari Strauss dan Corbin (2007) dalam (Nugrahani, 2014), penelitian kualitatif merupakan sebuah konsep penelitian yang menekankan pada peneliti sebagai alat pengumpul data utama yang secara umum mengkaji berbagai peristiwa maupun perilaku yang sedang diamati melalui sebuah pemaknaan makna. Model penelitian yang digunakan

juga menggunakan studi kepustakaan (*Library Research*) atau metode studi pustaka sebagai sumber pencarian data sekunder, data sekunder ini diperoleh dengan cara mengumpulkan data dan informasi berdasarkan data dari pihak ketiga yang didasarkan dari sumber seperti jurnal umumilmiah, buku, sampai artikel berita yang kredibel. Penulis menggunakan metode ini dikarenakan hanya menggunakan studi kepustakaan tanpa melakukan studi lapangan secara langsung seperti survey atau wawancara. Validasi data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kudeta Thailand 1991

Menitik beratkan pada anggapan sebagai pelindung negara, militer terus mendorong adanya intervensi pada urusan non-militer, kuatnya pengaruh dari militer dan lemahnya otoritas dari sipil memaksa Thailand menjadi sebuah negara yang otoriter melalui berbagai peristiwa kudeta yang mewarnai dinamika kehidupan bernegara Thailand.

Kudeta militer yang terjadi pada tahun 1991 di Thailand, merupakan satu dari sekian banyak peristiwa kudeta yang berakhir pada keberhasilan dalam menggulingkan pemerintahan sebelumnya. Kudeta ini berhasil mengakhiri pemerintahan Chatichai Choonhavan yang telah terpilih menjadi perdana Menteri dan berhasil mengambil kontrol yang besar atas kekuatan militer. NPKC atau *National Peacekeeping Council* digadang-gadang sebagai aktor utama dibalik peristiwa kudeta militer yang terjadi pada tahun 1991, NPKC dengan Anand Panyarachun sebagai perdana Menteri sementara dan Jend. Sunthorn Kongsompong sebagai ketua mulai melakukan kudeta militer dan menjadi pihak yang berkuasa dalam pemerintahan saat itu. Kudeta ini secara umum merupakan kudeta ke-18 sejak berakhirnya sistem monarki absolut pada 1932.

Dikutip dari (Tamada, 1995) NPKC melakukan serangan kudeta kepada pemerintahan Chatichai dengan dilandasi lima alasan utama. *Pertama*, sistem politik pemerintahan yang cenderung korup, *Kedua*, pemerintahan yang membangun sebuah citra pemerintahan yang demokratis, namun pada kondisi empirisnya para PM, menteri dan

anggota parlemen menjalani pemerintahan yang mengarah pada keterpusatan kekuasaan melalui penyingkiran berbagai kekuatan oposisi lainnya. *Ketiga*, kabinet pemerintahan seringkali melakukan intervensi perubahan posisi pejabat pemerintah guna membuat mereka tunduk pada kekuasaan. *Keempat*, isu percobaan pembunuhan terhadap kerajaan yang dilakukan oleh PM. Serta *kelima* adalah intervensi dari pemerintah yang terus mencoba menghancurkan solidaritas dan persatuan militer. Hal ini disebabkan dari adanya pengajuan pergantian Menteri pertahanan oleh PM kepada raja. Alasan terakhir juga sekaligus menjadi bukti dari adanya sebuah perwujudan konflik antara sipil dan militer sejak November 1990 silam. Militer menduga kuat bahwa perdana Menteri mengajukan tuntutan pemberhentian militer dan intervensi pengaruh militer, khususnya terhadap komandan militer saat itu. Oleh sebab itu, hal tersebut juga dilihat oleh militer sebagai sebuah ancaman eksistensi militer di pemerintahan.

Pemerintahan perdana Menteri Chatichai tersebut juga dinilai terus merusak citra militer karena pemerintahannya yang korup. Chatichai telah merubah kedudukan militer di dalam lingkup perpolitikan Thailand karena konflik internal yang terus terjadi dalam masa kepemimpinannya (Tamada, 1995). Hal-hal tersebut juga menjadi alasan kuat dari dilakukannya kudeta militer atas komando NPKC (*National Peacekeeping Council*), yang menjadi awal dari berakhirnya pemerintahan Chatichai Choonhavan melalui penangkapan Chatichai saat perjalanannya menuju kerajaan. Namun dalam hal ini, keberhasilan dari kudeta militer yang dilakukan pada tahun 1991 tidak juga menjadi bukti dari besarnya kekuatan militer saat itu. Kudeta ini malah menunjukkan bahwa adanya penurunan kekuatan yang ditunjukkan oleh militer, yang dimana kekuatan tersebut tidak setaradengan kekuatan militer di era 1950an dengan dampak dominasi pengaruh militer yang terus memudar karena masuknya liberasi yang telah berkembang.

Sejak keberhasilan kudeta, pemerintahan baru terus melakukan pembaharuan konstitusi negara dengan kembali diadakannya pemilu. Pemilu saat itu dimenangkan oleh partai Sammakitham sebagai salah satu partai bentukan junta militer dengan Jend. Suchinda Kraprayoon

sebagai perdana Menteri. Partai ini berhasil memperoleh suara mayoritas dengan total 74 kursi dan menjadi salah satu partai pro-militer yang mendukung kepemimpinan pemerintahan junta militer. Pemerintahan Suchinda juga tidak lepas dari berbagai persoalan yang ada. Pengangkatannya sebagai perdana Menteri dinilai sebagai sebuah kesalahan awal dari pemerintahannya, para pro-demokrasi menilai bahwa perdana Menteri seharusnya berasal dari dalam parlemen itu sendiri daripada berasal dari luar parlemen.

Tuntutan yang semakin berkembang, mengharuskan kepemimpinan militer 'mengizinkan' liberalisasi sampai pada titik tertentu untuk menenangkan berbagai elemen liberal saat itu. Militer juga mulai menyiasati adanya pembaharuan konstitusi kembali serta pelaksanaan pemilu pada waktu dekat. Namun, gelombang revolusi demokratis di masyarakat Thailand pun semakin sulit untuk dibendung, hal ini semakin menguat ketika adanya indikasi lanjutan kekuasaan dari pihak militer pada pemilu nanti. Para partai politik dan masyarakat mengajukan berbagai protes massal melalui revolusi pada bulan Mei tahun 1992. Karena kondisi saat itu, Raja akhirnya kembali melakukan intervensi pada perkembangan politik di Thailand, hal ini dilakukan dengan melakukan pertemuan dengan Suchinda Kraprayoon dan Srimuang yang berakhir dengan pengunduran diri dari Suchinda Kraprayoon sebagai perdana Menteri. Posisi perdana Menteri tersebut akhirnya digantikan oleh Chamlong Srimuang sebagai PM baru Thailand.

Pasca Pergantian, posisi militer mulai menunjukkan adanya penurunan keterlibatan militer dari pemerintahan sipil, militer juga mulai memberi pengakuan terhadap adanya supremasi sipil di Thailand. Revolusi Thailand ini diwujudkan dengan peristiwa Mei 1991 melalui demonstrasi dan konstitusi 1992 atau 'konstitusi rakyat' sebagai konstitusi baru yang berisi pasal-pasal yang lebih demokratis.

### **Kudeta Thailand 2006**

Pada 2006, terjadi kembali sebuah kudeta yang dipimpin oleh militer dengan tujuan untuk menggulingkan perdana menteri

Thaksin Shinawatra pada saat itu, yang telah menjabat selama lima tahun, yakni tepatnya sejak tahun 2001 hingga 2006 sebab adanya dugaan tindakan korupsi, otoritarianisme, pengkhianatan terhadap Raja, tindakan non-diplomatik, serta penggelapan pajak. Kudeta dipimpin oleh Jenderal Sonthi Boonyaratglin pada tanggal 19 September 2006. Akibat pengkhianatan-pengkhianatan fatal yang dilakukan oleh Thaksin Shinawatra terhadap Thailand, kejadian tersebut tentunya memercikkan amarah rakyat, dimana pada akhirnya terbentuk sebuah aliansi yang bertujuan untuk melakukan kritik, protes, serta membuka secara terang-terangan akan bukti-bukti faktual akan pengkhianatan Thaksin kepada ranah publik. Aliansi tersebut bernama *People Alliance Democracy* (PAD). Adapun, bentuk-bentuk kegiatan yang dipimpin oleh PAD berupa demonstrasi-demonstrasi yang untungnya dilakukan dengan tertib tanpa memakan korban, sebab hadirnya dukungan dari militer Thailand (Kanchoochat & Hewison, 2016).

Akan tetapi, yang membuat menarik kudeta ini adalah latar belakang tokoh yang berusaha digulingkannya itu sendiri, yakni Thaksin Shinawatra. Ia dikatakan sebagai seorang tokoh politik yang cukup *problematic* dan *ironic*. Pernyataan ini didasari oleh realitasnya bahwa selama masa kepemimpinan Thaksin, ia justru berhasil memimpin dengan baik, serta menghantarkan rakyat Thailand kepada perkembangan di sektor ekonomi. Awal mula kejayaan Thaksin adalah pada saat ia mendirikan partai sendiri yang bernama *Thai Rak Thai* (Rakyat Thai Mencintai Sesama Rakyat Thai) pada tahun 1998, yang memperoleh kemenangan pada pemilu 2001. Dimana sebelumnya, Thaksin merupakan seorang mantan perwira polisi sebelum ia memutuskan untuk terjun ke dunia politik. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, atas kepemimpinan Thaksin, Thailand akhirnya berhasil memiliki demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan berekspresi, pers yang relatif bebas serta masyarakat sipil yang aktif, serta keistimewaan dalam masa kepemimpinan beliau berupa gerakan sosial kampanye yang menargetkan aksi perlindungan terhadap kepentingan rakyat miskin atau kurang mampu. Thaksin menanamkan sebuah slogan, yaitu "*Think New, Act New, For Every Thai*", dimana slogan tersebut membawa rakyat Thailand

kepada perasaan akan besarnya harapan terhadap Thaksin.

Thaksin membawa rakyat Thailand menuju kesejahteraan dengan prinsip nilainya untuk menjunjung tinggi kepentingan rakyat. Maka dari itu, ia membuat sebuah kebijakan yang berfokus untuk memperbaiki taraf kehidupan rakyat miskin di Thailand, yang dinamakan *Pro Poor Policies*. Sebab kebijakan-kebijakan yang diterapkan pada masanya, Thaksin berhasil meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan rakyatnya, sehingga mereka melihat Thaksin sebagai tokoh pertama yang berhasil membawa Thailand menuju kehidupan yang lebih demokratis. Contoh kebijakan-kebijakan Thaksin selain *Pro Poor Policies* yang berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat adalah seperti kenaikan upah minimum, kemudian kartu kredit untuk petani, serta penyediaan komputer tablet untuk anak-anak sekolah.

Kebijakan-kebijakan tersebut dilakukan atas upaya Thaksin dalam memperjuangkan pembangunan manusia serta menjunjung tinggi ilmu pengetahuan sebagai bagian dari nilai-nilai demokrasi. Sebagai seorang tokoh politik yang menjunjung tinggi kebebasan berekspresi dan pers, Thaksin juga berusaha bersikap adil dengan mengizinkan media untuk bebas menyampaikan aspirasi, bahkan jika dalam bentuk kritik terhadap dirinya sendiri.

Maka dari itu, sosok Thaksin yang dipandang sebagai seorang tokoh penyelamat Thailand sangat memberikan *syok* kepada masyarakat ketika mendapat kabar akan adanya dugaan tindakan korupsi, penggelapan pajak, dan sebagainya yang justru tidak mencerminkan nilai-nilai yang selama ini Thaksin terapkan selama masa jabatannya. Hingga pada akhirnya terjadi penggulingan kekuasaan Thaksin oleh Jenderal Sonthi Boonyaratglin pada tanggal 19 September 2006, jatuhnya kepemimpinan Thaksin memercikkan konflik di antara masyarakat, dimana mereka terbelah menjadi dua kubu, yakni kubu pro-demokrasi *The United front of Democracy against Dictatorship* (UDD) atau pendukung pemerintahan Thaksin, yang disebut dengan

kubu kaos merah, serta kubu kontra yang mendukung *People's Alliance for Democracy* (PAD) seperti elit militer dan elit bisnis, yang disebut dengan kubu kaos kuning. Kubu kaos kuning merupakan gerakan politik yang didukung oleh elit-elit yang terkait dengan kerajaan, pebisnis, dan kelas menengah masyarakat urban. Sedangkan kubu kaos merah sebagian besar terdiri dari rakyat pedesaan dan berasal dari masyarakat dengan golongan ekonomi menengah ke bawah.

Thaksin, yang mayoritas dukungan politiknya disebabkan karena perebutan kekuasaan dengan elit militer dan elit bisnis, menjadi alasan utama terbentuknya kubu kaos kuning. Hal ini dikarenakan selama masa pemerintahan Thaksin, dia menggunakan memanfaatkan popularitasnya melalui massa untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan menempatkan jaringan pribadinya ke posisi-posisi kunci di pemerintah. Akibatnya, atas latar belakang Thaksin sendiri yang berasal dari militer, menimbulkan reaksi negatif dari elit militer tua, seperti Jenderal Prem, Jenderal Saprang, dan Jenderal Sonthi yang pada akhirnya berhasil menggulingkan Thaksin dari jabatannya.

### **Kudeta Thailand 2014**

Peristiwa ini terjadi pada Selasa 22 Mei 2014 ketika Angkatan Darat Kerajaan Thailand melakukan sebuah kudeta terhadap pemerintahan Perdana Menteri kala itu, Yingluck Shinawatra. Thailand pun dinyatakan dalam keadaan darurat setelah krisis politik yang melanda negara tersebut sudah berlangsung sekitar enam bulan. Aksi massa yang terjadi di ibukota, Bangkok, menuntut Perdana Menteri Yingluck Shinawatra untuk mengundurkan diri. Hal ini disebabkan karena pemerintahan tersebut dianggap dikendalikan oleh abangnya, mantan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra, yang sempat dikudeta pula kekuasaannya pada tahun 2006. Krisis politik Thailand ini berlangsung sejak November 2013 sampai dengan Mei 2014 yang dilancarkan oleh Komite Rakyat Demokratis Reformasi (PDCR) (Putra, 2016). Walaupun demikian, sebelum pelancaran kudeta tersebut, Yingluck sudah dipaksa turun dari jabatannya oleh Mahkamah Konstitusi akibat permasalahan pada penyimpangan dana skema subsidi beras yang mengakibatkan kerugian keuangan negara

miliaran dollar.

Namun ternyata, setelah pemerintahan Yingluck berhasil digulingkan, aksi melalui demonstrasi maupun terror oleh massa yang anti-Yingluck kian memanas dan dilaporkan semakin bertambah. Bahkan terdapat berita yang menyatakan bahwa kediaman dari Yingluck sempat dilempar granat. Tidak hanya aksi yang dilancarkan oleh massa, Angkatan Bersenjata pun segera melakukan tindakan setelah diberlakukannya status darurat militer. Tentara-tentara pun segera dialokasikan pada tempat-tempat yang dianggap vital seperti pusat perekonomian dan stasiun televisi dengan dibekali persenjataan militer. Bahkan, militer Thailand sempat mengeluarkan pernyataan pemberlakuan status darurat perang. Militer pun menguasai dan mengambil alih stasiun televisi, sehingga penyiaran televisi kala itu mengatakan bahwa darurat militer dilaksanakan untuk memulihkan perdamaian dan ketertiban. Tak hanya itu, tindakan yang dilakukan oleh pihak militer adalah pengambil alihan tanggung jawab sebagai perdana menteri oleh Pemimpin Militer tertinggi Jenderal yaitu Prayuth Chan Ocha. Pihak militer pun melakukan penerapan beberapa kebijakan seperti pemberlakuan jam malam dari pukul 22.00 sampai 05.00 dan penghentian penyebaran pesan yang dapat memancing kerusuhan dengan resiko penangguhan operasi layanan media oleh militer. Mereka menganggap tindakan yang diambil sebagai bentuk tanggung jawab terhadap negara dan bukan suatu bentuk pengkudetaan. Walaupun memang oleh sebagian masyarakat, langkah militer dengan penggunaan senjata tersebut dilakukan sebagai bentuk upaya pengkudetaan untuk melawan pemerintahan.

Selain status darurat militer, Thailand pun mengambil tindakan darurat ekonomi berdasarkan hasil rapat antara Panglima Angkatan Udara Thailand Marsekal Prajin Juntong dan pejabat kementerian ekonomi. Terdapat setidaknya 30 proposal yang akan diajukan dan dibahas bersama Jendral Prayuth Chan Ocha, salah satunya adalah pencairan subsidi bagi petani, pemberantasan lintah darat pada petani, dan pinjaman bunga

rendah untuk petani. Namun, ternyata kudeta ini mengakibatkan peningkatan inflasi sebesar 0,40% dan merupakan terbesar dalam kurun 14 bulan terakhir.

Berikut adalah kronologis perjalanan krisis politik di Thailand yang berakhir pada pengkudetaan oleh Angkatan Darat Kerajaan Thailand pada Mei 2014 (Tempo.co, 2014):

1. 31 Oktober 2013: Adanya protes dan pengkritikan terhadap RUU Amnesti yang memberikan kesempatan untuk Thaksin Shinawatra kembali tanpa proses hukum.
2. 1 November 2013: Majelis Rendah Parlemen mendukung RUU.
3. 11 November 2013: Majelis Tinggi Parlemen menolak RUU.
4. 25 November 2013: Pendukung oposisi bersiap untuk demonstrasi.
5. 30 November 2013: Demonstrasi dari oposisi mulai melakukan aksi.
6. 8 Desember 2013: Anggota parlemen dari oposisi mengundurkan diri secara massal dari parlemen.
7. 9 Desember 2013: Yingluck menginginkan pemilu dini.
8. 22 Desember 2013: Adanya unjuk rasa anti-pemerintahan Yingluck.
9. 26 Desember 2013: Pemerintah menolak seruan KPU untuk menunda pemungutan suara.
10. 27 Desember 2013: Panglima militer Thailand membantah adanya kemungkinan kudeta.
11. 28 Desember 2013: Penembak tak dikenal membunuh seorang pengunjuk rasa.
12. 13 Januari 2014: Demonstrasi yang "menutup" jalanan di kota Bangkok.
13. 16 Januari 2014: Badan antikorupsi menyelidiki skema subsidi beras.
14. 17 Januari 2014: Aksi lempar granat oleh pendukung oposisi.
15. 21 Januari 2014: Pemerintah menyatakan keadaan darurat.
16. 26 Januari 2014: Adanya penembakan mati kepada seorang pemimpin protes.
17. 2 Februari 2014: Demonstrasi mencegah dibukanya TPS untuk menggagalkan Pemilu.
18. 11 Februari 2014: KPU mengatakan

- pemilihan ulang akan dilaksanakan pada 27 April.
19. 14 Februari 2014: Ribuan politisi berusaha merebut kembali gedung-gedung yang dikepung oleh massa.
  20. 19 Februari 2014: Pengadilan melarang adanya bentuk kekerasan terhadap demonstran.
  21. 1 Maret 2014: Demonstran menghentikan blockade.
  22. 18 Maret 2014: Status darurat Bangkok dicabut.
  23. 21 Maret 2014: MK membatalkan pemilu.
  24. 30 April 2014: Pemerintah mengumumkan Pemilu akan dilaksanakan pada 20 Juli 2014.
  25. 7 Mei 2014: MK melakukan penurunan secara paksa kepada Yingluck dan beberapa menteri lainnya.
  26. 9 Mei 2014: Demonstran meminta Senat menggulingkan pemerintahan yang tersisa.
  27. 10 Mei 2014: Kelompok Kaus Merang memperingatkan adanya kemungkinan "perang saudara".
  28. 15 Mei 2014: KPU pada 20 Juli tidak bisa dilanjutkan dan Jenderal Prayut Chan-Ochan memberikan peringatan adanya pemadaman kekerasan politik pada demonstran antipemerintahan.
  29. 20 Mei 2014: Tentara menyatakan darurat militer dan menekankan bahwa hal ini bukan kudeta.
  30. 22 Mei 2014: Militer Thailand menyatakan melakukan kudeta dan mengambil alih pemerintahan.

Langkah yang dilakukan oleh militer Thailand dalam meng kudeta pemerintahan telah memberikan suatu kritik terhadap penagakannya sistem politik demokrasi, meski militer beranggapan upaya mereka dalam mengambil alih pemerintahan adalah untuk menyelamatkan negara. Pemerintahan yang demokratis perlu dibangun di atas dasar kesepakatan dan kesepakatan politik dari para aktor politik yang terpilih melalui mekanisme pemilihan umum yang

demokratis, bukan dibangun atas dasar kehendak atau asumsi militer tentang kegagalan pemerintahan. Demokrasi dibangun atas dasar kedewasaan dalam menentukan jalan politik, meski didalamnya terdapat banyak dinamika.

### **Dinamika Hubungan Sipil - Militer**

Secara umum, dikutip dari (Farrelly, 2013), bahwa dinamika persoalan kudeta militer di Thailand disebabkan oleh kegagalan dari pemerintah untuk dapat mengkonsolidasikan demokrasi dengan baik. Keberadaan budaya demokrasi masih sering kali tidak dapat benar-benar tertanam dalam diri para elite militer itu sendiri. Militer masih berlandung di balik anggapan sebagai pelindung negara dengan kewajiban untuk melakukan intervensi pada setiap persoalan nasional. Hal tersebut jugayang akhirnya membuat adanya prinsip pembenaran bagi eksistensi kedudukan militer sendiri.

Mengacu pada historis kedudukan militer di Thailand, posisi militer pada awalnya merupakan tentara kerajaan yang melindungi para raja dan kerajaan. Bahkan kesetiiaannya pada kerajaan melahirkan berbagai hak-hak istimewa dari konstitusi terhadap militer sebagai kekuatan politik yang sangat diperhitungkan. Keistimewaan tersebut juga akhirnya menuntun adanya kecenderungan dari militer untuk dapat selalu memainkan peran dengan posisi yang penting dalam kehidupan non-militer, khususnya politik (Myre, 2014). Tujuan kudeta yang sering dilontarkan oleh pihak militer, mengenai reformasi pada suatu rezim dengan pemulihan stabilitas negara kiranya dibantah oleh para kritikus yang tidak setuju, dengan mengatakan militer hanya ingin menyingkirkan seorang pemimpin yang tidak dapat mereka toleransi dan mengancam eksistensinya<sup>2</sup>

Namun, yang juga menarik dalam dinamika kudeta militer di Thailand adalah adanya beberapa kasus yang menunjukkan persaingan diantara aktor militer itu sendiri. Gagasan tentang kudeta yang cenderung diakibatkan dari berbagai kondisi yang lemah, miskin, dan disfungsi dengan persaingan ideologis yang mendalam kirannya tidak berlaku di Thailand, kudeta Thailand tampaknya memiliki ciri khas mereka sendiri dengan kondisi kudeta tidak berdarah.

Adapun, apabila mengacu pada konstitusi

Thailand 2007 mengenai sistem demokrasi negara, Thailand merupakan salah satu negara yang mengadopsi sistem demokrasi sebagai arah utama bernegara. Namun, dalam tatanan empirisnya, dinamika kudeta militer yang terjadi di Thailand menjadi bukti dari adanya ketidakselarasan antara kondisi politik yang terjadi dengan sebuah prinsip dalam demokrasi. Terutama prinsip adanya kontrol sipil kepada kedudukan militer di dalam institusi pemerintahan Thailand. Hal ini dilihat dari keikutsertaan kekuatan yang besar dari militer terhadap pentas politik di Thailand yang bahkan kedudukannya dapat dilihat sebanding dengan beberapa aktor sipil negara lain. Sampai saat ini, perkembangan demokrasi di Thailand masih diselubungi oleh kedudukan monarki dan supremasi militer yang kuat, intervensi dalam kehidupan politik juga akhirnya terus mengganggu proses demokrasi di Thailand. Ketidaksiapan tradisi dan sistem demokrasi yang ada di Thailand mengakibatkan tidak berfungsinya proses konsolidasi demokrasi yang terjadi.

### SIMPULAN

Thailand merupakan negara dengan sistem pemerintahan monarki konstitusional yang terletak di kawasan Asia Tenggara. Sejak diberlakukannya sistem konstitusi monarki pada tahun 1932, Thailand harus dihadapkan pada berbagai permasalahan terkait perebutan kekuasaan antara konstitusionalisme dan militer. Hampir semua Perdana Menteri Thailand pun dilatarbelakangi oleh orang dari militer. Perebutan kekuasaan atau kudeta di Thailand terjadi sebanyak 11 kali pada tahun 1932, 1933, 1947, 1951, 1957, 1958, 1971, 1976, 1977, 1991, 2006, dan 2014 dengan kurang lebih 30 kali percobaan.

Berdasarkan pembahasan Krisis Politik Kudeta Thailand pada tahun 1991, 2006, dan 2014, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Militer sebagai pelindung negara kerap kali memanfaatkan tanggungjawabnya tersebut untuk melakukan intervensi pada urusan non-militer. Hal ini juga dilatarbelakangi pada kuatnya pengaruh dari militer dan lemahnya otoritas sipil.
2. Adanya penyalahgunaan kekuasaan

yang dilakukan oleh Thaksin Shinawatra sebab ia diduga melakukan tindakan korupsi, otoritarianisme, pengkhianatan terhadap Raja, tindakan non-diplomatik, serta penggelapan pajak.

3. Thaksin pun juga memanfaatkan popularitasnya melalui massa untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan menempatkan jaringan pribadinya ke posisi-posisi kunci dipemerintah.
4. Adanya bentuk dinasti politik yang dilakukan oleh Perdana Menteri Yingluck Shinawatra mengingat bahwa kakaknya yaitu Thaksin Shinawatra merupakan mantan perdana menteri yang pernah dikudeta pada tahun 2006.
5. Adanya penyimpangan yang didasarkan pada faktor individual mengingat bahwa pemerintahan Yingluck diduga dikendalikan oleh Thaksin Shinawatra dan penerapan RUU Amnesti yang memberikan kesempatan atau peluang peniadaan hukuman bagi Thaksin Shinawatra.

Adanya muslihat yang dilancarkan oleh Militer Thailand dengan kedok menjaga dan melindungi negara padahal sebenarnya tengah melakukan kudeta.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bauer, M. W., & Ege, J. (2012). Politicization within the European Commission's bureaucracy. *International Review of Administrative Sciences*, 78(3), 403–424. <https://doi.org/10.1177/0020852312445022>
- Ch, N. A. (2008). *Bangsa Gagal Mencari Identitas Kebangsaan*. Yogyakarta: LKiS.
- Dahrendorf, R. (1959). *Class and Class Conflict in Industrial Society*. Stanford, California: Stanford University.
- Coser, L.A. (1956). *The Function of Social Conflict*. Glencoe: Free Press.
- Cohen, E.A. (1997). Civil-military relations. *Orbis*, 41(2), 177-186. [https://doi.org/10.1016/S0030-4387\(97\)90061-2](https://doi.org/10.1016/S0030-4387(97)90061-2)
- Detik News. (2014, May 23). *Thailand dan Sejarah Panjang 11 Kali Kudeta Militer*. Retrieved from <https://news.detik.com/internasional/d->

- 2590861/thailand-dan-sejarah-panjang-11kali-kudeta-militer.
- Farrelly, N. (2013). *Why democracy struggles: Thailand's elite coup*. 67(3), 281–296.
- Huntington, S. P. (1959). *The Soldier and The State, The Theory and Politics of Civil-Military Relations*. Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press.
- Kanchoochat, V., & Hewison, K. (2016). Introduction: Understanding Thailand's Politics. *Journal of Contemporary Asia*, 46(3), 371–387.
- Myre, G. (2014). Why Does Thailand Have So Many Coups? Retrieved May 9, 2021, from <https://www.npr.org/sections/parallels/2014/05/22/314862858/why-does-thailand-haveso-many-coups>
- Nasikun, D. (1995). *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nugrahani, F. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: Deepublish.
- Nugroho, F., Kana, N. L., & Ds, P. (2004). *Konflik dan Kekerasan Pada Aras Lokal*. Turusan Salatiga: Pustaka Percik.
- Putra, B. E. (2016). *Kudeta Thailand (2014) Dan Implikasinya Terhadap Kesiapan Thailand Menghadapi Asean Economic Community 2015: Analisis Terhadap Sektor Pariwisata Thailand*. Universitas Pasundan.
- Setiawan, D., Octavianus, C., Janis, D., Winadi, G., Abdullah, Y., Umasugi, T., & Suyuti, H. (2013). *Perkembangan Hubungan Militer Dengan Sipil Di Indonesia*. 1(1), 74–83. Retrieved from <https://core.ac.uk/download/pdf/324147395.pdf>
- Tamada, Y. (1995). Coups in Thailand, 1980-1991: classmates, internal conflicts and relations with the government of the military. *Southeast Asian Studies (Kyoto)*, 33(3), 317–339. [https://doi.org/10.20495/tak.33.3\\_317](https://doi.org/10.20495/tak.33.3_317)
- Tempo.co. (2014). *Linimasi Krisis Thailand Menuju Kudeta Militer*. Retrieved from <https://dunia.tempo.co/read/579700/linimasa-krisis-thailand-menuju-kudeta-militer>
- Varma, S.P. (1987). *Teori Politik Modern*. Jakarta: Rajawali Pers.